



BAGIAN ANGGARAN 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 *AUDITED*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2021
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar isi	
Pernyataan Telah Direviu	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.3. Basis Akuntansi	13
A.4. Dasar Pengukuran	13
A.5. Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.2. Belanja Negara	24
B.3. Belanja Pegawai	26
B.4. Belanja Barang	27
B.5. Belanja Modal	29
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
C.1. Kas Dibendahara Pengeluaran	30
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	30
C.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	30
C.4. Piutang Bukan Pajak	31
C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31
C.6. Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	32
C.7. Persediaan	32
C.8. Peralatan dan Mesin	34
C.9. Gedung dan Bangunan	37
C.10. Jalan, Irigasi dan Jaringan	37
C.11. Aset Tetap Lainnya	37
C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
C.13. Aset Tak Berwujud	38
C.14. Aset Lain-Lain	39
C.15. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	39
C.16. Utang Kepada Pihak ke Tiga	40
C.17. Uang Muka dari KPPN	40
C.18. Utang Jangka Pendek Lainnya	41
C.19. Ekuitas	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	42
D.2. Beban Pegawai	42
D.3. Beban Persediaan	43
D.4. Beban Barang dan Jasa	43
D.5. Beban Pemeliharaan	45
D.6. Beban Perjalanan Dinas	45
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	46
D.8. Beban Bantuan Sosial	46
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	47
D.11. Beban Lain-lain	47
D.12. Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	47
D.13. Pos-Pos Luar Biasa	47
E. Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
E.1. Ekuitas Awal	48
E.2. Surplus / (Defisit) LO	48
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	48
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset	48
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan	48
E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap	49
E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.4.5. Koreksi Lain-lain	49
E.5. Transaksi Antar Entitas	49
E.6. Ekuitas Akhir	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	50
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	51
VI. Lampiran	
Laporan-laporan Pendukung	52
Laporan Barang Pengguna	53
Lampiran Penyusutan Aset Tetap	54
Lampiran Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan BPK	55
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	56
Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas	57

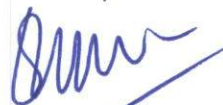
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2021
Inspektur



Gunarso Djoko Santoso



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat 10110, Phone : 3459444 (Hunting), Fax 34834679
Website : <http://www.kemenkopmk.go.id> – email : info@kemenkopmk.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2020 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2021

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,




Muhadjir Effendy

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2020 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember TA 2020 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.398.656.051 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp207.287.358.066 atau mencapai 89,11% dari alokasi anggaran sebesar Rp232.623.827.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp164.247.743.163 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.730.318.675; Aset Tetap (neto) sebesar Rp159.794.604.176 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp722.820.312.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp368.845.860 dan Rp163.878.897.303.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp245.458.882, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp216.638.065.788 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp216.392.606.906. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.334.778.117 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp215.057.828.789.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp163.709.867.291 ditambah Defisit-LO sebesar Rp215.057.828.789, kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp0, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp0 dan Koreksi Lain-lain senilai Rp0 dan transaksi antar entitas senilai Rp215.226.858.801, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp163.878.897.303.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 *AUDITED* DAN 31
DESEMBER 2019 *AUDITED***

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER TA 2020		% thd Angg	31 DESEMBER TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.398.656.051	0,00	1.129.961.960
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.398.656.051	0,00	1.129.961.960
BELANJA	B.2.				
Belanja					
Belanja Pegawai	B.3	66.800.000.000	54.688.181.894	81,87	60.283.213.646
Belanja Barang	B.4	151.612.626.000	143.863.893.077	94,89	213.730.684.285
Belanja Modal	B.5	14.211.201.000	8.735.283.095	61,47	5.009.557.500
JUMLAH BELANJA		232.623.827.000	207.287.358.066	89,11	279.023.455.431

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2019 AUDITED

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CAT	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	6.424.000	87.591
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	26.839.130	180.462.613
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	409.578.500	502.280.600
Piutang Bukan Pajak	C.4	253.815.612	14.356.730
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(1.269.078)	(71.783)
Plutang Bukan Pajak (Netto)	C.6	252.546.534	14.284.947
Persediaan	C.7	3.034.930.511	1.519.072.537
JUMLAH ASET LANCAR		3.730.318.675	2.216.188.288
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.8	83.811.500.009	76.925.679.564
Gedung dan Bangunan	C.9	154.159.346.109	154.040.207.650
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.10	144.386.000	144.386.000
Aset Tetap Lainnya	C.11	969.395.742	969.168.592
Akumulasi Penyusutan	C.12	(79.290.023.684)	(70.723.448.373)
JUMLAH ASET TETAP		159.794.604.176	161.355.993.433
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.13	1.503.526.500	1.437.526.500
Aset Lain-lain	C.14	1.789.027.900	250.365.400
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(2.569.734.088)	(999.735.463)
JUMLAH ASET LAINNYA		722.820.312	688.156.437
JUMLAH ASET		164.247.743.163	164.260.338.158
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	335.582.730	369.920.663
Hibah Yang Belum Disahkan	C.17	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.18	6.424.000	87.591
Utang jangka Pendek Lainnya	C.19	26.839.130	180.462.613
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		368.845.860	550.470.867
JUMLAH KEWAJIBAN		368.845.860	550.470.867
EQUITAS			
EQUITAS			
Ekuitas	C.20	163.878.897.303	163.709.867.291
JUMLAH EKUITAS		163.878.897.303	163.709.867.291
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		164.247.743.163	164.260.338.158

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2019 AUDITED**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
				Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	245.458.882	38.999.503	206.459.379	529,39
JUMLAH PENDAPATAN		245.458.882	38.999.503	206.459.379	529,39
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	54.803.893.896	60.261.402.384	(5.457.508.488)	(9,06)
Beban Persediaan	D.3	5.855.072.846	6.313.731.971	(458.659.125)	(7,26)
Beban Barang dan Jasa	D.4	91.313.035.561	133.981.067.974	(42.668.032.413)	(31,85)
Beban Pemeliharaan	D.5	6.501.212.390	7.087.388.907	(586.176.517)	(8,27)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	48.194.635.252	98.289.056.182	(50.094.420.930)	(50,97)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	24.179.066	8.523.600	15.655.466	183,67
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	9.944.839.482	10.872.336.635	(927.497.153)	(8,53)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.197.295	(2.173.349)	3.370.644	(155,09)
Beban Lain-lain	D.11	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN		216.638.065.788	316.811.334.304	(100.173.268.516)	(31,62)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(216.392.606.906)	(316.772.334.801)	100.379.727.895	(31,69)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	1.270.845.000	459.283.000	811.562.000	176,70
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		132.471.864	630.270.233	(497.798.369)	(78,98)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		68.538.747	7.664.866	60.873.881	794,19
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.334.778.117	1.081.888.367	252.889.750	23,37
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(215.057.828.789)	(315.690.446.434)	100.632.617.645	(31,88)
POS LUAR BIASA					
Pendapatan PNBP	D.13	-	-	-	-
Beban Perjalanan		-	-	-	-
Beban Persediaan		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(215.057.828.789)	(315.690.446.434)	100.632.617.645	(31,88)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 *AUDITED* DAN 31 DESEMBER 2019 *AUDITED***

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	E.1	163.709.867.291	164.541.693.343
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(215.057.828.789)	(315.690.446.434)
DAMPAK KUMULATIF KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS*)	E.4	-	3.370.604.035
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	3.896.914.497
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	(127.432.192)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	(398.878.270)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	215.226.858.801	311.488.016.347
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN		207.287.358.066	279.023.455.431
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN		(1.398.656.051)	(1.129.961.960)
TRANSFER KELUAR		(296.100.814)	(799.127.024)
TRANSFER MASUK		-	-
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG		9.634.257.600	31.905.272.963
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL		-	2.488.376.937
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		169.030.012	(831.826.052)
EKUITAS AKHIR	E.6	163.878.897.303	163.709.867.291

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 3, Jakarta Pusat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sedangkan fungsinya sendiri adalah sebagai berikut:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
- Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen dengan visi “**Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong**”.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas.
- Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terdiri dari 6 Deputi dan 1 Setmenko yaitu:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
Sekretariat yang bertanggungjawab berkenaan dengan administrasi dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK.
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
3. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
6. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga
7. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Satuan Kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah salah satu satuan kerja di Kemenko PMK. DJSN berfungsi sebagai Perumus Kebijakan Umum dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tugas DJSN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
2. Mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial nasional;
3. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Dan DJSN berwenang melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Satuan Kerja Revolusi Mental adalah juga merupakan salah satu satuan kerja yang ada di Kemenko PMK. Sekretariat Revolusi Mental berfungsi menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, urusan administrasi umum, pengelolaan data dan informasi serta fasilitasi hubungan antar instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Revolusi Mental.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang dijabarkan dalam Rancangan RPJM Tahap ke-3 serta menyelaraskan arah kebijakan dan strategi nasional dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka koordinasi dilaksanakan untuk upaya Pembangunan Manusia Indonesia melalui tujuan:

- 1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.**

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan

dasar. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan-pelayanan dasar masyarakat Indonesia.

- b. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok marginal di Indonesia.
- c. meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong.

2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.

Ketercapaian kedua sasaran strategis tersebut diindikasikan pada meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap laporan keuangan sebagai

hasil pengelolaan keuangan oleh Kemenko PMK, dan meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Rekap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional di Kemenko PMK dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran Optimalisasi - revisi terakhir (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output	Ket
1	001	Rumusan Kebijakan/Draft Peraturan Penyelenggaraan SJSN	2.500.892.000	2.289.169.800	91,53%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	PN
2	002	Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2.090.400.000	1.897.825.626	90,79%	4 Laporan	4 Laporan	100%	PN
3	003	Menyusun Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi SJSN	1.547.522.000	1.508.044.032	97,45%	4 Laporan	4 Laporan	100%	PN

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output	
Kode Kegiatan : 6228									
1	001	Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Masyarakat	Rp7.530.110.000	Rp7.441.736.860	98,83%	4 Layanan	4 Layanan	100%	
2	002	Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	Rp4.554.570.000	Rp4.327.690.891	95,02%	49 Gugus Tugas	32 Gugus Tugas	100%	
3	003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	Rp1.304.655.000	Rp1.260.320.000	96,60%	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Kemenko PMK, maka Kemenko PMK melakukan *refocusing/realokasi* anggaran untuk beberapa output berupa Penyediaan anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp12.001.598.000 dengan realisasi sebesar Rp10.868.019.559 atau 90,55 persen.

Adapun alokasi tersebut meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, Belanja Perjalanan dinas dan belanja modal.

Penanggulangan Covid untuk satker Sekretariat DJSN adalah sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output
1	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared	5.600.000	5.555.000	99,20%	2 Unit	2 Unit	100%
2	001	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial	631.661.000	471.153.153	74,59%	5 Paket	4 Paket	80%

Penanggulangan Covid untuk satker Menko PMK adalah sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output
1	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19	41.100.000	36.839.000	89,63%	1 Layanan	1 layanan	100%
2	994	Layanan perkantoran	10.046.917.000	9.202.710.573	91,60%	1 Layanan	1 layanan	100%

Penanggulangan Covid untuk satker Revolusi Mental adalah sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output
1	001	Layanan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	600.000.000	598.224.300	99,70%	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	119.920.000	108.872.250	90,79%	1 Layanan	1 Layanan	100%
4	994	Layanan Perkantoran	302.900.000	192.471.027	63,54%	1 Layanan	1 Layanan	100%
5	003	Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Masyarakat	162.000.000	161.300.000	99,57%	1 Layanan	1 Layanan	100%
	994	Layanan Perkantoran	91.500.000	90.894.256	99,34%	1 Layanan	1 Layanan	100%

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Per 31 Desember Tahun 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural dibawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 3 satker yang mana seluruh satker tersebut menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	036	Menko Bidang PMK (427768)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	036	Sekretariat DJSN (427785)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	036	Revolusi Mental (419372)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Jumlah	3	-	-	-	-	-	-	-	3
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual mulai tahun 2015. Penerapan SAP Berbasis Akrual tersebut sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2020 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi.

- Secara khusus dapat diinformasikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi/rencana PNBPN dalam DIPAnya. Namun demikian dalam kegiatan operasional sehari-hari masih dimungkinkan terdapat realisasi PNBPN yang berasal dari Kegiatan Non Operasional diantaranya dan tidak terbatas pada:
 - a. penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang merupakan kelebihan pembayaran akun 51 (belanja pegawai) kepada pegawai;
 - b. penerimaan Kembali belanja barang, belanja modal dan/atau belanja lainnya (TAYL) yang merupakan setoran pengembalian belanja ke Kas Negara dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI; dan
 - c. pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh rekanan (pihak ketiga).
 - d. Pendapatan dari pelepasan aset non lancar.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah yang dibuktikan dengan tanda terima.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi

ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pada tahun 2020, tiga satker di Kemenko PMK melakukan revisi anggaran sebanyak sebagai berikut:

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jumlah Revisi
427768	Menko PMK	12
427785	Sekretariat DJSN	7
419372	Revolusi Mental	8

Terdapat penurunan anggaran ketika tahun berjalan, yaitu adanya APBN P TA 2020 yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	APBN				APBN-P (REVISI TERAKHIR)			
			51	52	53	TOTAL	51	52	53	TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL		PEGAWAI	BARANG	MODAL	
1	427768	Satker Menko Bid PMK	66.800.000.000	123.253.492.000	2.000.000.000	192.053.492.000	66.800.000.000	111.201.575.000	13.103.370.000	191.104.945.000
2	419372	Satker Revolusi Mental	-	28.491.047.000	-	28.491.047.000	-	21.895.819.000	200.000.000	22.095.819.000
3	427785	Satker Sekretariat DJSN	-	21.405.200.000	255.000.000	21.660.200.000	-	18.515.232.000	907.831.000	19.423.063.000
		TOTAL	66.800.000.000	173.149.739.000	2.255.000.000	242.204.739.000	66.800.000.000	151.612.626.000	14.211.201.000	232.623.827.000

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER TA 2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	66.800.000.000	66.800.000.000
Belanja Barang	173.149.739.000	151.612.626.000
Belanja Modal	2.255.000.000	14.211.201.000
Jumlah Belanja	242.204.739.000	232.623.827.000

Realisasi
Pendapatan
Rp1.398.656.051

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.398.656.051 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Estimasi Pendapatan dan

Realisasi Pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.270.845.000	-
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP / TGR Pensiunan	-	6.000.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	732	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	121.810.319	-
Jumlah	-	1.398.656.051	-

Realisasi Pendapatan sampai Triwulan IV TA 2020 melebihi estimasi pendapatan pada periode yang berkenaan, hal tersebut karena Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Kementerian / Lembaga yang memiliki alokasi / rencana PNBPN dalam DIP-nya. Namun dalam kegiatan operasional sehari-hari masih dimungkinkan terdapat realisasi PNBPN yang berasal dari Kegiatan Non Operasional diantaranya dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang merupakan kelebihan pembayaran akun 51 (belanja pegawai);
- b. penerimaan Kembali belanja barang / modal dan / atau belanja lainnya (TAYL) yang merupakan setoran pengembalian belanja ke Kas Negara dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI.
- c. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya missal lelang, dan merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non/TP/TGR Pensiunan atas nama Eka Yulianti, dimana pendapatan tersebut dilakukan penyetoran melalui TASPEN.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan sampai dengan Triwulan IV TA 2020 dibandingkan dengan Triwulan IV TA 2019 terdapat kenaikan sebesar 23,65 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN	REALISASI SD 31 DESEMBER T.A. 2020	REALISASI SD 31 DESEMBER T.A. 2019	NAIK (TURUN) % TERHADAP DESEMBER 2019
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.270.845.000	459.283.000	176,70
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP /TGR Pensiunan	6.000.000	6.000.000	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	38.999.503	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	732	49.939.198	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	121.810.319	575.740.259	(78,84)
Jumlah	1.398.656.051	1.129.961.960	23,78

Realisasi Belanja
Rp207.287.358.066

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp207.287.358.066 atau 89,11% dari anggaran belanja sebesar Rp232.623.827.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember TA 2020 tersaji sebagai berikut:

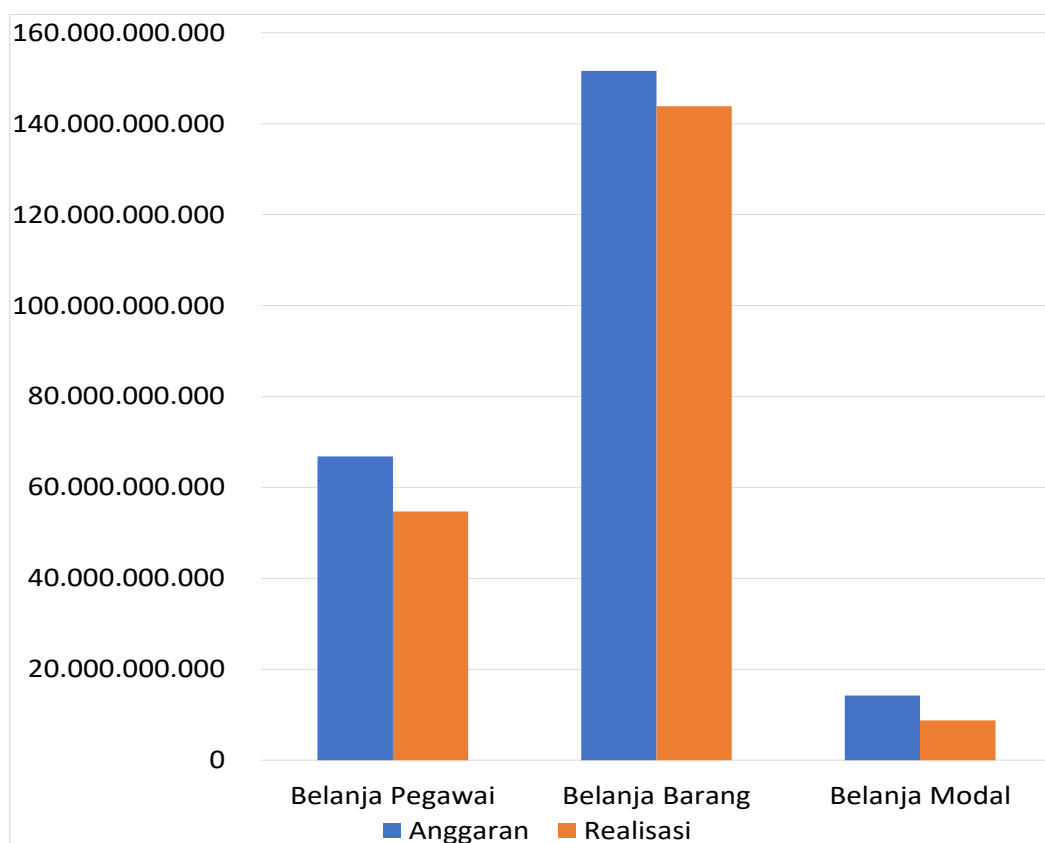
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2020

Uraian	31 Desember TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	66.800.000.000	54.759.918.594	81,98
Belanja Barang	151.612.626.000	143.907.553.495	94,92
Belanja Modal	14.211.201.000	8.735.283.095	61,47
Total Belanja Kotor	232.623.827.000	207.402.755.184	89,16
Pengembalian Belanja	-	(115.397.118)	
Total Belanja	232.623.827.000	207.287.358.066	89,11

Realisasi anggaran dan belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran			Realisasi			% Real Angg.
	Non Covid-19	Covid-19	Total	Non Covid-19	Covid-19	Total	
Belanja Pegawai	66.800.000.000	-	66.800.000.000	54.688.181.894	-	54.688.181.894	81,87
Belanja Barang	139.657.728.000	11.954.898.000	151.612.626.000	133.038.267.518	10.825.625.559	143.863.893.077	94,89
Belanja Modal	14.164.501.000	46.700.000	14.211.201.000	8.692.889.095	42.394.000	8.735.283.095	61,47
Total Belanja	220.622.229.000	12.001.598.000	232.623.827.000	196.419.338.507	10.868.019.559	207.287.358.066	89,11

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

PROGRAM	31 DESEMBER TA 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	79.765.715.000	76.538.699.451	95,95
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	152.858.112.000	130.748.658.615	85,54
Total Belanja	232.623.827.000	207.287.358.066	89,11

Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2020 mengalami penurunan sebesar 25,71 persen dibandingkan 31 Desember TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2020	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2019	NAIK (TURUN) % TERHADAP DESEMBER 2019
Belanja Pegawai	54.688.181.894	60.283.213.646	(9,28)
Belanja Barang	143.863.893.077	213.730.684.285	(32,69)
Belanja Modal	8.735.283.095	5.009.557.500	74,37
Jumlah	207.287.358.066	279.023.455.431	(25,71)

Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2020 mengalami penurunan sebesar 25,71 persen dibandingkan 31 Desember TA 2019. Penurunan belanja ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan

penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) pada wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Pertengahan September 2020. Dan dilanjutkan dengan adanya PSBB di pertengahan September 2020 sampai dengan pertengahan Desember 2020. Selain itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, maka Kemenko PMK mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi pegawainya.

Belanja Pegawai
Rp54.688.181.894

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.688.181.894 dan Rp60.283.213.646 atau terjadi penurunan sebesar 9,28 persen. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya pembayaran tunjangan kinerja ke 13 atau Tukin THR di Lingkup Kemenko PMK.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TA 2020	REALISASI S.D 31 DESEMBER TA 2020	REALISASI S.D 31 DESEMBER TA 2019	% REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) % TERHADAP DESEMBER 2019
Belanja Gaji Pokok PNS	15.785.383.000	14.897.310.690	14.995.939.140	94,37	(0,66)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	270.000	257.111	252.017	95,23	2,02
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	966.117.000	914.683.165	949.568.196	94,68	(3,67)
Belanja Tunj. Anak PNS	241.000.000	237.779.068	242.041.872	98,66	(1,76)
Belanja Tunj. Struktural PNS	4.651.870.000	3.601.220.000	4.037.675.000	77,41	(10,81)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	35.420.000	29.120.000	32.480.000	82,21	(10,34)
Belanja Tunj. PPh PNS	189.192.000	137.823.348	174.087.462	72,85	(20,83)
Belanja Tunj. Beras PNS	703.923.000	678.647.820	695.159.580	96,41	(2,38)
Belanja Uang Makan PNS	2.954.097.000	2.782.245.000	2.119.559.000	94,18	31,27
Belanja Tunjangan Umum PNS	420.825.000	419.185.000	437.095.000	99,61	(4,10)
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	405.500.000	378.261.250	209.375.000	93,28	80,66
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Ke	40.446.403.000	30.683.386.142	36.400.590.031	75,86	(15,71)
Jumlah Belanja Kotor	66.800.000.000	54.759.918.594	60.293.822.298	81,98	(9,18)
Pengembalian Belanja	-	(71.736.700)	(10.608.652)	-	576,21
Jumlah Belanja Bersih	66.800.000.000	54.688.181.894	60.283.213.646	81,87	(9,28)

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp143.863.893.077 dan Rp213.730.684.285. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 32,69 persen dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2019. Realisasi belanja barang TA 2020 adalah Rp143.863.893.077 atau 94,89% dari anggaran sebesar Rp151.612.626.000. Penurunan belanja ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) pada wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Pertengahan September 2020. Dan dilanjutkan dengan adanya PSBB di pertengahan September 2020 sampai dengan pertengahan Desember 2020. Selain itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, maka Kemenko PMK mengeluarkan kebijakan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) bagi pegawainya.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

Uraian Jenis Belanja	ANGGARAN			REALISASI			Realisasi s.d 31 Desember TA 2019	% Realisasi TA 2020	Naik (Turun) % Terhadap Desember 2019
	Non Covid 19	Covid 19	Total	Non Covid 19	Covid 19	Total			
Belanja Barang Operasional	30,579,573,000	1,499,175,000	32,078,748,000	29,920,395,160	1,133,110,891	31,053,506,051	28,700,493,643	96.80	8.20
Belanja Barang Non Operasional	12,189,217,000	2,137,560,000	14,326,777,000	11,084,879,323	1,947,782,987	13,032,662,310	18,866,624,978	90.97	(30.92)
Belanja Jasa	37,491,179,000	2,884,398,000	40,375,577,000	35,363,352,822	2,474,735,450	37,838,088,272	56,371,254,835	93.72	(32.88)
Belanja Pemeliharaan	6,617,058,000	28,000,000	6,645,058,000	6,466,272,390	25,080,000	6,491,352,390	7,087,388,907	97.69	(8.41)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	46,606,430,000	4,179,765,000	50,786,195,000	44,184,835,854	4,062,685,931	48,247,521,785	92,390,261,236	95.00	(47.78)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	102,782,000	-	102,782,000	76,250,607	-	76,250,607	6,012,381,232	74.19	(98.73)
Belanja Barang Persediaan	6,071,489,000	1,226,000,000	7,297,489,000	5,983,207,780	1,184,964,300	7,168,172,080	6,016,021,420	98.23	19.15
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	139,657,728,000	11,954,898,000	151,612,626,000	133,079,193,936	10,828,359,559	143,907,553,495	215,444,426,251	94.92	(33.20)
Jumlah Pengembalian Belanja	-	-	-	(40,926,418)	(2,734,000)	(43,660,418)	(1,713,741,966)	-	(97.45)
Jumlah Belanja Netto	139,657,728,000	11,954,898,000	151,612,626,000	133,038,267,518	10,825,625,559	143,863,893,077	213,730,684,285	94.89	(32.69)

Realiasi Belanja Covid-19 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar

Rp1.133.110.891 digunakan untuk pembayaran belanja habis pakai seperti lisensi *video conference* (Zoom) sebagai penunjang koordinasi (rapat) jarak jauh dan belanja penunjang untuk meningkatkan imunitas pegawai dan kebersihan seperti pembelian *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker yang tidak membentuk persediaan.

- b. Belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.947.782.987 digunakan untuk belanja habis pakai berupa APD/Alat Uji Medis/Rapid Test habis pakai (tidak membentuk persediaan) yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini COVID-19 bagi para pegawai Kemenko PMK dan pegawai *Management Building*. Selain itu, belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 juga digunakan untuk pembelian konsumsi bagi pegawai yang melaksanakan WFO (*Work From Office*) selama masa PSBB DKI.
- c. Belanja Barang Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.184.964.300 digunakan untuk membeli persediaan alat rapid.
- d. Belanja jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.474.735.450 digunakan untuk pembayaran biaya *rapid test* atau PCR test COVID-19 sebagai deteksi dini/Tracing dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kemenko PMK.
- e. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp25.080.000 digunakan untuk menyediakan tempat cuci tangan portabel untuk pegawai dan tamu yang datang ke Kemenko PMK
- f. Belanja perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Satker Menko PMK sebesar Rp4.062.685.931 digunakan untuk membiayai seluruh jenis perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam kota, luar kota dalam rangka penanganan Covid-19 (termasuk pegawai yang melaksanakan tugas *Work From Office*). Sebagaimana diatur dalam dalam Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 perihal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Belanja Modal
Rp8.735.283.095

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.735.283.095 dan Rp5.009.557.500. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2020 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember TA 2019 sebesar 74,37 persen. Realisasi Belanja modal TA 2020 adalah 61,47 persen dari anggaran. Peningkatan belanja ini disebabkan oleh adanya pengadaan kendaraan dinas roda empat yaitu mobil sedan dan Mini Bus sebesar Rp4.856.000.000 di satker Menko PMK.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI			REALISASI S.D 31 DESEMBER T.A 2019	% REALISASI TA 2020	Naik (Turun) % Terhadap Desember 2019
	Non Covid-19	Covid-19	Total Anggaran TA 2020	Non Covid-19	Covid-19	Total Realisasi TA 2020			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.864.501.000	46.700.000	13.911.201.000	8.507.750.636	42.394.000	8.550.144.636	4.304.371.140	61,46	98,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	-	200.000.000	119.138.459	-	119.138.459	353.526.360	59,57	(66,30)
Belanja Modal Lainnya	100.000.000	-	100.000.000	66.000.000	-	66.000.000	351.660.000	66,00	(81,23)
Jumlah Belanja Kotor	14.164.501.000	46.700.000	14.211.201.000	8.692.889.095	42.394.000	8.735.283.095	5.009.557.500	61,47	74,37
Pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	14.164.501.000	46.700.000	14.211.201.000	8.692.889.095	42.394.000	8.735.283.095	5.009.557.500	61,47	74,37

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp6.424.000*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.424.000 dan Rp87.591 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Des-20					31-Des-19	
	Tunai & Bank	UM / Voucher	Kwitansi	Pajak	Kas pada BPP	Tunai & Bank	Uang Tunai
Satker Revolusi Mental	-		-	-		-	-
Jumlah					-		-
Satker Menko Bidang PMK	6.424.000		-	-	-	87.500	-
Jumlah					6.424.000		87.500
Satker Sekretariat DJSN	-	-		-		91	-
Jumlah					-		91
Total					6.424.000		87.591

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

No	Satker	Jenis	Jumlah
1	Satker 427768 (Menko Bidang PMK)	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	6.424.000
	Jumlah		6.424.000

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp26.839.130*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp26.839.130 dan Rp180.462.613. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Dec-20	31-Dec-19
Revolusi Mental (419372)	PPh & PPN yang belum disetor	-	100.731.540
Menko Bidang PMK (427768)	PPh & PPN yang belum disetor	-	40.074.382
Sekretariat DJSN (427785)	PPh & PPN yang belum disetor	26.839.130	39.656.691
Jumlah		26.839.130	180.462.613

*Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp409.578.500*

C.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp409.578.500 dan

Rp502.280.600. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Di Muka terdiri atas biaya sewa gudang untuk penyimpanan arsip dan sewa kendaraan dinas roda empat pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, serta sewa rumah bagi Staf Khusus Menko PMK pada satuan kerja Menko PMK. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) adalah sebagai berikut:

No	Satker	Jenis Sewa	Jangka waktu	Mulai	Berakhir	Nilai kontrak	Beban per Bulan	s.d Desember 2020
								Prepaid
1		Sewa gudang	24	04/02/2019	03/02/2021	196.284.000	8.178.500	8.178.500
2	DJSN	Sewa kendaraan operasional TA 2020	12	20/04/2020	19/04/2021	144.000.000	12.000.000	48.000.000
3		Sewa kendaraan operasional TA 2020	12	19/06/2020	18/06/2021	145.800.000	12.150.000	72.900.000
4		Sewa kendaraan operasional TA 2020	12	16/11/2020	15/11/2021	144.000.000	12.000.000	132.000.000
5	Menko PMK	Sewa Rumah (Satker Menko PMK)	12	30/09/2020	29/09/2021	198.000.000	16.500.000	148.500.000
Total								409.578.500

Piutang Bukan Pajak
Rp253.815.612

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp253.815.612 dan Rp14.356.730. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Dec-20	31-Dec-19
Menko Bidang PMK (427768)	Piutang atas pencairan jaminan pelaksanaan PT Grafikom Multi Media	245.458.882	-
	Saldo atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pensiunan PNS an. Eka Yulianti	8.356.730	14.356.730
Jumlah		253.815.612	14.356.730

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –Piutang
Bukan Pajak
(Rp1.269.078)

C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp1.269.078) dan (Rp71.783). Penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Dec-20		31-Dec-19	
		Bruto	Penyisihan	Bruto	Penyisihan
Menko PMK (427768)	Piutang Bukan Pajak	253.815.612	(1.269.078)	14.356.730	(71.783)
Jumlah		253.815.612	(1.269.078)	14.356.730	(71.783)

Piutang Bukan Pajak
Netto Rp252.546.534

C.6. Piutang Bukan Pajak (*neto*)

Nilai Piutang Bukan Pajak (*neto*) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar *Neto* Rp252.546.534 dan Rp14.284.947. Piutang Bukan Pajak tahun 2020 setelah dikurangi dengan nilai estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendeknya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang (Penyisihan Piutang Tak Tertagih). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Dec-20			31-Dec-19		
		Bruto	Penyisihan	Neto	Bruto	Penyisihan	Neto
Menko PMK (427768)	Piutang Lainnya	253.815.612	(1.269.078)	252.546.534	14.356.730	(71.783)	14.284.947
Jumlah		253.815.612	(1.269.078)	252.546.534	14.356.730	(71.783)	14.284.947

Persediaan
Rp3.034.930.511

C.7. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp3.034.930.511 dan Rp1.519.072.537.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31-Des-20	31-Des-19
Barang Konsumsi	3.028.393.698	1.435.248.881
Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Ke Masyarakat	-	66.779.064
Persediaan Lainnya	6.536.813	17.044.592
Jumlah	3.034.930.511	1.519.072.537

Rincian persediaan obat yang kadaluarsa adalah sebagai berikut:

No	Jenis Obat	Jumlah Obat	Harga Satuan	Total
1	Triaminic Syrup Pilek	4	81.620	326.480
2	Triaminic Syrup Batuk & Pilek	1	74.140	74.140
3	Amlodipine 5 mg	3	15.034	45.102
4	Flucadex	16	5.962	95.392
5	FG Troces	12	29.700	356.400
6	Erphamazole Salep	14	10.120	141.680
7	Farmoten	27	12.840	346.680
8	Erla Mycetin Ear Drop	3	6.443	19.329
9	Helixime Syrup	3	36.300	108.900
10	Cefixime 200	15	61.600	924.000
11	Kaltrofen Supp	2	103.972	207.944
12	Sanprima	9	13.200	118.800
13	Baquinor	2	228.250	456.500
14	Triaminic Syrup Ekspektoran	2	81.620	163.240
15	Mertigo	27	50.600	1.366.200
16	DEXAMETHASONE INJEKSI	16	3.850	61.600
17	LIDOCAIN INJEKSI	57	2.750	156.750
18	OTSU D5	5	15.800	79.000
19	PRIMPERAN INJEKSI	3	47.825	143.475
20	RANITIDIN INJEKSI	7	65.500	458.500
21	SANMOL SYRUP	99	19.800	1.960.200
22	LISTERINE	2	27.000	54.000
23	BETADINE SABUN ANTICEPTIC 100 ML	1	38.500	38.500
24	ALLOFAR 100 mg	5	3.473	17.365
25	AMLODIPINE 5 mg	4	15.034	60.136
26	SIMVASTATIN 20 mg	9	34.650	311.850
27	VITAZYM	16	13.200	211.200
28	NEO PROTIFED	3	11.000	33.000
29	COUNTERPAIN 15 gr	1	80.000	80.000
30	KLORFESON	1	10.450	10.450
31	INFUSE SET	2	10.000	20.000
32	Accutrend Cholesterol	1	460.000	460.000
33	ACCU CHECK PERFORMA	3	350.000	1.050.000
34	UA SURE	1	300.000	300.000
35	TEGADERM 1624	30	9.707	291.210
TOTAL				10.548.023

Obat yang kadaluarsa akan dilakukan pemusnahan sesuai aturan yang berlaku.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Adapun rincian per satker adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Persediaan	31-Dec-20
Revolusi Mental (419372)	Barang Konsumsi	1.349.314.500
Menko Bidang PMK (427768)	Barang Konsumsi	1.671.354.198
	Persediaan Lainnya	6.536.813
Sekretariat DJSN (427785)	Barang Konsumsi	7.725.000
Jumlah		3.034.930.511

Sampai dengan 31 Desember 2020, saldo persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat yang diperoleh sebelum tahun 2016 sampai laporan ini diterbitkan belum seluruhnya terdistribusi. Barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat di satker Menko PMK berupa buku-buku yang seharusnya dibagikan kepada peserta kegiatan/sosialisasi, namun karena pada saat dilakukan kegiatan/sosialisasi banyak peserta yang tidak hadir maka masih

terdapat sisa buku yang belum didistribusikan. Sementara barang persediaan berupa HP Smartphone Asus Zenfone 32 GB dan 16 GB sedianya akan dibagikan kepada beberapa kementerian terkait Komnas Zoonosis namun komisi tersebut dibubarkan berdasarkan Perpres Nomor 116 Tahun 2016 dan masih terdapat sisa HP yang belum sempat dibagikan. Sedangkan di Satker Revolusi Mental terdapat Barang Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat berupa buku modul *Training of Facilitator II* sebanyak 13 buku. Buku modul tersebut diadakan di tahun 2016 pada saat kegiatan *Training of Facilitator* (TOF), dan terdapat peserta yang tidak hadir sehingga terdapat buku yang tidak terdistribusikan. Setelah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak diadakan kegiatan TOF sehingga buku tidak bisa terdistribusi. Kemenko PMK berupaya untuk selalu mengamankan persediaan dan Barang Persediaan diserahkan ke Masyarakat yang sudah cukup lama pengadaannya.

Peralatan dan Mesin
Rp83.811.500.009

C.8. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp83.811.500.009 dan Rp76.925.679.564. Terdapat mutasi tambah nilai peralatan dan mesin pada satker Menko PMK sebesar Rp7.774.529.305; pada satker Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional sebesar Rp883.110.000; dan pada satker Revolusi Mental sebesar Rp199.450.000.

Rincian mutasi tambah nilai peralatan dan mesin pada satker Menko PMK sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Pompa Lainnya	6.720.000
2	Sedan	4.445.000.000
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	411.000.000
4	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	328.240.000
5	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	8.940.000
6	Mesin Fotocopy Electronic	102.300.000
7	Lemari Besi/Metal	9.460.000
8	Lemari Kayu	51.810.000
9	Rak Besi	4.455.000
10	Hydrant	199.728.615
11	Alat Penghancur Kertas	9.798.000
12	Mesin Absensi	126.900.000
13	Mesin Fogging	31.350.001
14	Kursi Besi/Metal	136.000.000
15	Kursi Kayu	74.800.000
16	Sice	79.200.000
17	Meja Rapat	51.150.000
18	Meja Marmer	24.420.000
19	Kasur/Spring Bed	36.478.200
20	Lemari Es	12.170.000
21	A.C. Window	172.612.000
22	Televisi	20.897.800
23	Tiang Bendera	8.500.000
24	Dispenser	2.925.000
25	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.264.500
26	Tripod Camera	54.280.000
27	Video Conference	316.800.000
28	Kamera Udara	9.800.000
29	Genset	198.033.000
30	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.947.000
31	Tensimeter	3.861.000
32	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	2.596.000
33	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	2.271.500
34	Lemari Steriil	4.543.000
35	Tabung O2	1.070.850
36	Autoclave Table	27.258.000
37	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2.200.000
38	Lemari Obat (Kaca)	11.883.000
39	Kursi Dorong Temperatur	1.233.100
40	Monitor	10.988.999
41	Air Set Airomatik	19.536.000
42	Boor Gigi	2.907.960
43	Tang Set	12.518.880
44	Tang Incisivus Atas Susu	9.002.400
45	Alat Kedokteran Bedah Lainnya	3.894.000
46	Otoscope Halogen Lamp	1.427.800
47	Cardiologi Bed Uk 200X60X90 Electro	9.900.000
48	Cardiograph	41.536.000
49	Emergency Kit	8.437.000
50	Timbangan Elektron	1.298.000
51	Note Book	393.400.000
52	Tablet PC	47.310.700
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28.280.000
54	Acces Point	119.196.000
TOTAL		7.774.529.305

Adapun rincian peralatan dan mesin hasil pembelian TA 2020 dari satker DJSN adalah sebagai berikut:

URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KET
Jeep	Unit	1	498.000.000	
Lemari Besi/Metal	Buah	1	2.399.000	
Lemari Es	Buah	1	2.970.000	
Kompor Listrik (Alat Dapur)	Buah	1	1.499.000	
Televisi	Buah	1	23.000.000	
Camera Conference	Buah	3	60.000.000	
Microwave Oven	Buah	1	1.439.000	
Infrared Thermometer	Buah	2	5.555.000	Belanja Covid-19
P.C Unit	Buah	5	58.500.000	
Note Book	Buah	9	220.999.000	
Speaker Komputer	Buah	1	2.149.000	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	6.600.000	
TOTAL		30	883.110.000	

Sedangkan rincian pembelian peralatan dan mesin TA 2020 dari satker Revolusi Mental adalah sebagai berikut:

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI
Peralatan dan Mesin		8	199.450.000
Alat Penghancur Kertas	Buah	2	7.000.000
Video Conference	Buah	1	49.450.000
Tablet PC	Buah	5	143.000.000
			199.450.000

Transaksi terhadap Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	76.925.679.564
Mutasi tambah:	
Pembelian (Realisasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	8.486.455.305
Pembelian (Realisasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19)	42.394.000
Realisasi dari Tindak lanjut Rekomendasi Temuan BPK Tahun 2018 (Mobil Operasional Ford Ranger ex Tanggap Darurat Flu Burung)	328.240.000
Mutasi kurang:	
Pengajuan Penghapusan S-193/MK.6/WKN.07/KNL.03/2020	(1.538.662.500)
Transfer keluar ke Kementerian Sekretariat Negara	(432.606.360)
Saldo per 31 Desember 2020	83.811.500.009
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(67.400.653.761)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	16.410.846.248

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp154.159.346.109

C.9 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp154.159.346.109 dan Rp154.040.207.650.

Dan Realisasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	154.040.207.650
Mutasi tambah:	
Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	119.138.459
Mutasi kurang:	
Revaluasi Aset	-
Reklas jurnal take in hasil revaluasi Gedung dan Bangunan Tahun 2017-2018	-
Saldo per 31 Desember 2020	154.159.346.109
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(11.711.534.298)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	142.447.811.811

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp144.386.000

C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp144.386.000. Saldo tersebut terdiri dari jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA dan jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA. Tidak terjadi perubahan saldo terhadap jalan, jaringan, dan irigasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2020. Transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	144.386.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2020	144.386.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(40.390.625)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	103.995.375

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp969.395.742

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp969.395.742 dan Rp969.168.592. Transaksi terhadap

Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	969.168.592
Mutasi tambah:	
Realisasi dari Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-
Realisasi belanja modal lainnya	227.150
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar ke Kementerian Sekretariat Negara Sesuai BAST No. 2350/BAST/ROUM/INV.00/11/2019	-
Saldo per 31 Desember 2020	969.395.742
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(137.445.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	831.950.742

Sedangkan rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	552.789.962	-	552.789.962
2	Barang Bercorak Kesenian	156.645.000	(137.445.000)	19.200.000
3	Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	259.960.780	-	259.960.780
Total		969.395.742	(137.445.000)	831.950.742

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp79.290.023.684)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp79.290.023.684) dan (Rp70.723.448.373).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 83.811.500.009	Rp 67.400.653.761	Rp 16.410.846.248
2	Gedung dan Bangunan	Rp 154.159.346.109	Rp 11.711.534.298	Rp 142.447.811.811
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 144.386.000	Rp 40.390.625	Rp 103.995.375
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 969.395.742	Rp 137.445.000	Rp 831.950.742
Akumulasi Penyusutan		Rp 239.084.627.860	Rp 79.290.023.684	Rp 159.794.604.176

Aset Tak Berwujud
Rp1.503.526.500

C.13 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.503.526.500 dan Rp1.437.526.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Transaksi terhadap Aset Tak Berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	1.437.526.500
Mutasi tambah:	-
- Pembelian yang bersumber dari Belanja Modal Lainnya	66.000.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2020	1.503.526.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(780.706.188)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	722.820.312

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 786.876.500
2	ATB Lainnya	Rp 716.650.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		Rp 1.503.526.500
Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2020		Rp (780.706.188)
Jumlah		Rp 722.820.312

*Aset Lain-Lain
Rp1.789.027.900*

C.14. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.789.027.900 dan Rp250.365.400. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor sehari-hari serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo per 31 Desember 2019	250.365.400
Mutasi tambah:	
Persetujuan Penghapusan dari Peralatan dan Mesin S-193/MK.6/WKN.07/KNL.03/2020	1.538.662.500
Mutasi kurang:	
Pengusulan Penghapusan /Penjualan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2020	1.789.027.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(1.789.027.900)
saldo per 31 Desember 2020	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.569.734.088)*

C.15. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp2.569.734.088) dan (Rp999.735.463). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	Rp 786.876.500	Rp 780.706.188	Rp 6.170.312
2	ATB Lainnya	Rp 716.650.000	Rp -	Rp 716.650.000
Jumlah		Rp 1.503.526.500	Rp 780.706.188	Rp 722.820.312
B	Aset Lain Lain	Rp 1.789.027.900	Rp 1.789.027.900	Rp -
Jumlah		Rp 1.789.027.900	Rp 1.789.027.900	Rp -
Total		Rp 3.292.554.400	Rp 2.569.734.088	Rp 722.820.312

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp335.582.730

C.16. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp335.582.730 dan Rp369.920.663. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga tahun 2019 sebesar Rp369.920.663 telah dilakukan pembayaran di tahun 2020 seluruhnya. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
PT PLN	Rp192.267.965	Tagihan Langganan Listrik Pemakaian Bulan Desember 2020
PT TELKOM	Rp7.809.847	Tagihan Langganan telpon Pemakaian Bulan Desember 2020
Belanja Pegawai	Rp6.785.052	Akrual kenaikan gaji kenaikan pangkat bln Okt 2018 s.d Agustus 2020 dan kenaikan pangkat pengabdian Agustus 2020
Belanja Pegawai	Rp120.764.866	Akrual kekurangan Tukin PLT. PLH. Pegawai Bulan Okt s.d Des 2020
Belanja Pegawai	Rp7.955.000	Akrual Kekurangan Tunjangan Umum a.n Dewi Norma Utami, Fery Ferdiansyah, Marcelino, Alfian dan Holy Glora
Total	Rp335.582.730	

Uang Muka dari
KPPN Rp6.424.000

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.424.000 dan Rp87.591. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian

Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19
1	Satker Menko Bidang PMK	6.424.000	87.500
2	Satker Sekretariat DJSN	-	91
3	Satker Revolusi Mental	-	-
Jumlah		6.424.000	87.591

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp26.839.130*

C.18 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp26.839.130 dan Rp180.462.613. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga, Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Pajak yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu namun belum disetor s.d per tanggal pelaporan.

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19
1	Satker Menko Bidang PMK	-	40.074.382
2	Satker Sekretariat DJSN	26.839.130	39.656.691
3	Satker Revolusi Mental	-	100.731.540
Jumlah		26.839.130	180.462.613

*Ekuitas
Rp163.878.897.303*

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp163.878.897.303 dan Rp163.709.867.291. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp245.458.882

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.458.882 dan Rp38.999.503. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak ini merupakan pendapatan atas pengajuan klaim pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp245.458.882 kepada PT Asuransi Rama Satria Wibawa terhadap Kegiatan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop yang tidak dilaksanakan oleh PT Grafikom Multi Media. Namun PT Asuransi Rama Satria Wibawa belum mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut. Satker Menko PMK bukanlah satker yang kegiatan operasionalnya menghasilkan pendapatan, jadi pandemi Covid-19 tidak berdampak terhadap pendapatan satker Menko PMK. Rinciannya sebagai berikut;

Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN	s.d 31 Desember TA 2020	s.d 31 Desember TA 2019	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	-	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	245.458.882	38.999.503	529,39
Jumlah Pendapatan Jasa	245.458.882	38.999.503	529,39
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	245.458.882	38.999.503	529,39
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-
Jumlah Pendapatan BLU	-	-	-
Jumlah	245.458.882	38.999.503	529,39

Beban Pegawai
Rp54.803.893.896

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp54.803.893.896 dan Rp60.261.402.384. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN PEGAWAI	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK / (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	14.873.261.667	14.975.749.968	(0,68)
Beban Pembulatan Gaji PNS	252.951	221.703	14,09
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	914.683.165	947.882.656	(3,50)
Beban Tunj. Anak PNS	237.779.068	241.495.346	(1,54)
Beban Tunj. Struktural PNS	3.600.680.000	4.037.675.000	(10,82)
Beban Tunj. Fungsional PNS	29.120.000	32.480.000	(10,34)
Beban Tunj. PPh PNS	137.823.348	171.487.494	(19,63)
Beban Tunj. Beras PNS	678.575.400	695.159.580	(2,39)
Beban Uang Makan PNS	2.782.245.000	2.119.485.000	31,27
Beban Tunjangan Umum PNS	427.140.000	432.220.000	(1,18)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	378.261.250	209.375.000	80,66
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	30.744.072.047	36.398.170.637	(15,53)
Jumlah Beban Pegawai	54.803.893.896	60.261.402.384	(9,06)

*Beban Persediaan
Rp5.855.072.846*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp5.855.072.846 dan Rp6.313.731.971. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	5.848.053.743	6.243.660.642	(6,34)
Beban Persediaan Lainnya	7.019.103	70.071.329	(89,98)
Jumlah Beban Persediaan	5.855.072.846	6.313.731.971	(7,26)

*Beban Barang dan Jasa
Rp91.313.035.561*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp91.313.035.561 dan Rp133.981.067.974. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	21.462.962.958	20.433.544.945	5,04
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	746.556.500	628.696.634	18,75
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.025.194.800	5.555.925.856	(9,55)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.675.055.902	2.082.326.208	28,46
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	1.115.036.691	-	-
Beban Bahan	7.359.279.923	15.209.309.978	(51,61)
Beban Honor Output Kegiatan	3.572.760.000	3.407.470.000	4,85
Beban Barang Non Operasional Lainnya	152.839.400	249.845.000	(38,83)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	1.669.020.987	-	-
Beban Langganan Listrik	2.360.752.567	2.702.890.833	(12,66)
Beban Langganan Telepon	103.321.530	149.958.145	(31,10)
Beban Langganan Air	263.376.840	171.657.160	53,43
Beban Jasa Konsultan	6.410.320.805	13.879.061.381	(53,81)
Beban Sewa	6.061.947.070	4.906.555.641	23,55
Beban Jasa Profesi	5.998.835.000	12.131.820.000	(50,55)
Beban Jasa Lainnya	23.840.544.497	52.425.256.193	(54,52)
Beban Jasa Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	2.474.735.450	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	20.494.641	46.750.000,00	(56,16)
Jumlah	91.313.035.561	133.981.067.974	(31,85)

Realiasi Belanja Covid-19 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.115.036.691 digunakan untuk pembayaran belanja habis pakai seperti lisensi *video conference* (Zoom) sebagai penunjang kordinasi (rapat) jarak jauh dan belanja penunjang untuk meningkatkan imunitas pegawai dan kebersihan seperti pembelian *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker yang tidak membentuk persediaan.
- b. Belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.669.020.987 digunakan untuk belanja habis pakai berupa APD/Alat Uji Medis/*Rapid Test* habis pakai (tidak membentuk persediaan) yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini COVID-19 bagi para pegawai Kemenko PMK dan pegawai *Management Building*. Selain itu, belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 juga digunakan untuk pembelian konsumsi bagi pegawai yang melaksanakan WFO (*Work From Office*) selama masa PSBB DKI.
- c. Belanja jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.474.735.450 digunakan untuk pembayaran biaya *rapid test* atau *PCR test* COVID-19 sebagai deteksi dini/*Tracing* dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kemenko PMK.

Pada tahun 2020 terdapat pengesahan hibah jasa yang diterima Kemenko PMK

dari Friedrich Ebert Stiftung (FES) senilai Rp8.685.435.368 dan dari USAID senilai Rp948.822.232. Rincian hibahnya sebagai berikut:

No.	Donor	MPHLBJS	Akun	No. Register	Nilai		
					EUR	USD	IDR
1	FES	01130/MPHL-BJS/KEMENKO-PMK/12/2020	522191	237HG8TA	501.175,72	-	8.685.435.368
2	USAID	00236/MPHL-BJS/SET-DJSN/XII/2020	522131	2Q55U2FA		66.933,81	948.822.232
TOTAL					501.175,72	66.933,81	9.634.257.600

Beban

Pemeliharaan

Rp6.501.212.390

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.501.212.390 dan Rp7.087.388.907. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.290.176.113	3.439.620.517	(4,34)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	25.080.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.994.962.577	3.638.268.390	(17,68)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.133.700	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	44.000.000	9.500.000	363,16
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	9.860.000	-	-
Jumlah	6.501.212.390	7.087.388.907	(8,27)

Realiasi Belanja Covid-19 sebagaimana tersebut diatas adalah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp25.080.000 digunakan untuk menyediakan tempat cuci tangan portabel untuk pegawai dan tamu yang datang ke Kemenko PMK.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp48.194.635.252

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp48.194.635.252 dan Rp98.289.056.182. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	17.719.361.012	34.929.390.082	(49,27)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	687.080.000	1.984.655.000	(65,38)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.898.763.821	25.984.485.651	(54,21)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	4.062.685.931	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.750.493.881	29.522.306.607	(53,42)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	4.671.608.095	(100,00)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	76.250.607	1.196.610.747	(93,63)
Jumlah	48.194.635.252	98.289.056.182	(50,97)

Realiasi Belanja Covid-19 sebagaimana tersebut diatas adalah Belanja perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kemenko PMK sebesar Rp4.062.685.931 digunakan untuk membiayai transport pegawai yang melaksanakan tugas WFO (*Work From Office*) pada masa PSBB DKI.

Beban Barang
untuk
Dijual/Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp24.179.066

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang yang Diserahkan Ke Masyarakat Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp24.179.066 dan Rp8.523.600. Beban tersebut merupakan bagian dari program implementasi akuntansi berbasis akrual dengan memberikan buku-buku hasil cetakan kepada pihak lain.

*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	24.179.066	8.523.600	183,67
Jumlah	24.179.066	8.523.600	183,67

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp0. Hal ini dikarenakan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak dianggarkan Belanja Bantuan Sosial sehingga tidak terdapat Beban Bantuan Sosial.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp9.944.839.482

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp9.944.839.482 dan Rp10.872.336.635. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 6.558.489.174	7.428.531.506	(11,71)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 3.351.404.533	3.347.683.229	0,11
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp 3.609.650	3.609.650	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp -	17.180.625	(100,00)
Jumlah Penyusutan	9.913.503.357	10.797.005.010	(8,18)
Beban Amortisasi Software	Rp 31.336.125	75.331.625	(58,40)
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	31.336.125	75.331.625	(58,40)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.944.839.482	10.872.336.635	(8,53)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp1.197.295

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp1.197.295 dan (Rp2.173.349). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang terjadi untuk mencadangkan atau menyisihkan sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Mutasi ini berasal dari jurnal balik atas penyisihan Piutang Tak Tertagih pada akhir tahun 31 Desember 2019.

Beban Lain-lain
Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp0.

Surplus/ Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.334.778.117

D.12. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019*

URAIAN	S.d 31 Desember TA 2020	S.d 31 Desember TA 2019	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.270.845.000	459.283.000	176,70
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	132.471.864	630.270.233	(78,98)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	68.538.747	7.664.866	794,19
Surplus dari kegiatan Non operasional lainnya	1.334.778.117	1.081.888.367	23,37
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.334.778.117	1.081.888.367	23,37

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0

D.13. POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa Per 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
Rp163.709.867.291*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp163.709.867.291 dan Rp164.541.693.343.

*Surplus(defisit) LO
(Rp215.057.828.789)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar (Rp215.057.828.789) dan (Rp315.690.446.434). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

*Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas*

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari: koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban; koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas; dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. tidak terdapat transaksi yang mengakibatkan koreksi terhadap nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp3.896.914.497.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan (Rp127.432.192). Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan (Rp398.878.270). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp215.226.858.801

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp215.226.858.801 dan Rp311.488.016.347. Rincian Transaksi antar entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.398.656.051)
Ditagihkan ke Entitas Lain	207.287.358.066
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(296.100.814)
Pengesahan Hibah Langsung	9.634.257.600
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
Jumlah	215.226.858.801

Ekuitas Akhir Rp163.878.897.303

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp163.878.897.303 dan Rp163.709.867.291.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

*Kejadian-Kejadian
Penting Setelah
Tanggal Neraca*

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan keuangan ini disusun terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca dan berpengaruh secara signifikan terhadap saldo-saldo yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020. Kejadian penting setelah tanggal neraca yaitu Kemenko PMK belum menerima pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp245.458.882 dengan Nomor Jaminan 36.1102.12.20.286294.005 dari PT Asuransi Rama Satria Wibawa (PT ARSW) atas Kegiatan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop yang dilaksanakan oleh PT Grafikom Multi Media. Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 02/SPK/PPDK/12/2020 tanggal 16 Desember 2020, selama 15 hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp245.458.882 merupakan 5% dari nilai kontrak yaitu Rp4.909.177.641. Pihak Kemenko PMK telah memberikan surat peringatan ke-1, 2, dan 3 kepada PT Grafikom Multi Media. Sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, PT Grafikom Multi Media tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menyerahkan asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran sebagai persyaratan pencairan akhir tahun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA 2020, Pasal 25 ayat (2) huruf a. Oleh karena itu Pihak Kemenko PMK kemudian menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak atas kontrak tersebut dengan Nomor 01/SPEKS/PPDK/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan melaporkan PT Grafikom Multi Media ke dalam daftar hitam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pihak Kemenko PMK telah mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT ARSW dengan Nomor 01/PPK/PL/LKP.00/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan menyerahkan kelengkapan persyaratan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT ARSW tanggal 21 Januari 2021, namun PT ARSW belum mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu Kemenko PMK melaporkan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor 299/ROUM/LKP.001/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Tuntutan Claim Jaminan Pelaksanaan Nomor 36.1102.12.20.286294.005. Pihak Kemenko PMK masih menunggu jawaban/tanggapan dari pihak OJK dan tetap melakukan upaya penagihan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT ARSW. Terhadap jaminan

pelaksanaan yang belum dicairkan tersebut, pihak Kemenko PMK telah mencatat sebagai Piutang Bukan Pajak pada Neraca Laporan Keuangan Kemenko PMK TA 2020 senilai Rp245.458.882.

Pengungkapan
Lain-Lain

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- 1) Dapat disampaikan bahwa di Kemenko PMK tidak ada permasalahan hukum yang sedang dihadapi yang belum ada keputusan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan berpotensi untuk menimbulkan tagihan ke negara di masa yang akan datang
- 2) Anggaran dan Realisasi dengan menggunakan akun Covid-19 adalah sebagai berikut:

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
A.Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	521131	1.499.175.000	1.130.376.891	-
2	521241	2.137.560.000	1.947.782.987	-
3	521841	1.226.000.000	1.184.964.300	-
4	522192	2.884.398.000	2.474.735.450	-
5	523114	28.000.000	25.080.000	-
	524115	4.179.765.000	4.062.685.931	
5	532119	46.700.000	42.394.000	-
B.Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
-	-	-	-	-

Laporan-laporan Pendukung

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 26/04/21 10:34 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	1,398,656,051	(1,398,656,051)	0	0	1,129,961,960	(1,129,961,960)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	1,398,656,051	(1,398,656,051)	0	0	1,129,961,960	(1,129,961,960)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	66,800,000,000	54,688,181,894	12,111,818,106	82	61,027,722,000	60,283,213,646	744,508,354	99
	BELANJA BARANG	151,612,626,000	143,863,893,077	7,748,732,923	95	274,882,032,000	213,730,684,285	61,151,347,715	78
	BELANJA MODAL	14,211,201,000	8,735,283,095	5,475,917,905	61	6,988,390,000	5,009,557,500	1,978,832,500	72
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	232,623,827,000	207,287,358,066	25,336,468,934	89	342,898,144,000	279,023,455,431	63,874,688,569	81
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 11:21 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,424,000	87,591	6,336,409	7,234.09
Kas Lainnya dan Setara Kas	26,839,130	180,462,613	(153,623,483)	(85.13)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	409,578,500	502,280,600	(92,702,100)	(18.46)
Piutang Bukan Pajak	253,815,612	14,356,730	239,458,882	1,667.92
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,269,078)	(71,783)	(1,197,295)	1,667.94
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	252,546,534	14,284,947	238,261,587	1,667.92
Persediaan	3,034,930,511	1,519,072,537	1,515,857,974	99.79
JUMLAH ASET LANCAR	3,730,318,675	2,216,188,288	1,514,130,387	68.32
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	83,811,500,009	76,925,679,564	6,885,820,445	8.95
Gedung dan Bangunan	154,159,346,109	154,040,207,650	119,138,459	0.08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	144,386,000	144,386,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	969,395,742	969,168,592	227,150	0.02
AKUMULASI PENYUSUTAN	(79,290,023,684)	(70,723,448,373)	(8,566,575,311)	12.11
JUMLAH ASET TETAP	159,794,604,176	161,355,993,433	(1,561,389,257)	(0.97)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,503,526,500	1,437,526,500	66,000,000	4.59
Aset Lain-lain	1,789,027,900	250,365,400	1,538,662,500	614.57
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,569,734,088)	(999,735,463)	(1,569,998,625)	157.04
JUMLAH ASET LAINNYA	722,820,312	688,156,437	34,663,875	5.04
JUMLAH ASET	164,247,743,163	164,260,338,158	(12,594,995)	(0.01)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	335,582,730	369,920,663	(34,337,933)	(9.28)
Uang Muka dari KPPN	6,424,000	87,591	6,336,409	7,234.09
Utang Jangka Pendek Lainnya	26,839,130	180,462,613	(153,623,483)	(85.13)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	368,845,860	550,470,867	(181,625,007)	(32.99)
JUMLAH KEWAJIBAN	368,845,860	550,470,867	(181,625,007)	(32.99)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	163,878,897,303	163,709,867,291	169,030,012	0.10
JUMLAH EKUITAS	163,878,897,303	163,709,867,291	169,030,012	0.10
JUMLAH EKUITAS	163,878,897,303	163,709,867,291	169,030,012	0.10
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	164,247,743,163	164,260,338,158	(12,594,995)	(0.01)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 26/04/21 10:34

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	245,458,882	38,999,503	206,459,379	529.39
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	245,458,882	38,999,503	206,459,379	529.39
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	245,458,882	38,999,503	206,459,379	529.39
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	54,803,893,896	60,261,402,384	(5,457,508,488)	(9.056)
Beban Persediaan	5,855,072,846	6,313,731,971	(458,659,125)	(7.264)
Beban Barang dan Jasa	91,313,035,561	133,981,067,974	(42,668,032,413)	(31.846)
Beban Pemeliharaan	6,501,212,390	7,087,388,907	(586,176,517)	(8.271)
Beban Perjalanan Dinas	48,194,635,252	98,289,056,182	(50,094,420,930)	(50.966)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	24,179,066	8,523,600	15,655,466	183.672
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 26/04/21 10:34

Halaman : 2

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,944,839,482	10,872,336,635	(927,497,153)	(8.531)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,197,295	(2,173,349)	3,370,644	(155.09)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	216,638,065,788	316,811,334,304	(100,173,268,516)	(31.619)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(216,392,606,906)	(316,772,334,801)	100,379,727,895	(31.688)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,270,845,000	459,283,000	811,562,000	176.702
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,270,845,000	459,283,000	811,562,000	176.702
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	63,933,117	622,605,367	(558,672,250)	(89.731)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	132,471,864	630,270,233	(497,798,369)	(78.982)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	68,538,747	7,664,866	60,873,881	794.194
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,334,778,117	1,081,888,367	252,889,750	23.375
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(215,057,828,789)	(315,690,446,434)	100,632,617,645	(31.877)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(215,057,828,789)	(315,690,446,434)	100,632,617,645	(31.877)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 26/04/21 10:34

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	163,709,867,291	164,541,693,343	(831,826,052)	(0.506)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(215,057,828,789)	(315,690,446,434)	100,632,617,645	(31.877)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	3,370,604,035	(3,370,604,035)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	3,896,914,497	(3,896,914,497)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(127,432,192)	127,432,192	(100)
LAIN-LAIN	0	(398,878,270)	398,878,270	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	215,226,858,801	311,488,016,347	(96,261,157,546)	(30.904)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	169,030,012	(831,826,052)	1,000,856,064	(120.32)
EKUITAS AKHIR	163,878,897,303	163,709,867,291	169,030,012	0.103

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 26/04/2021 10:34 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	25,336,468,934	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,398,656,051	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	15,785,383,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	270,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	966,117,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	241,000,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	4,651,870,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	35,420,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	189,192,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	703,923,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	2,954,097,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	420,825,000
2.0	511512	Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	405,500,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	40,446,403,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	21,809,156,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	1,144,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	762,987,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	5,321,426,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	2,684,860,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	1,499,175,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	8,026,957,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,776,350,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	385,910,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	2,137,560,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	6,071,489,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	0	1,226,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,427,990,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	111,000,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	282,000,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	5,796,517,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	6,141,763,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	6,790,000,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	15,941,909,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,884,398,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	3,291,867,000
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	28,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,089,584,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	137,134,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	98,473,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	18,504,908,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	819,330,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	12,958,398,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 26/04/2021 10:34 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	4,179,765,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	14,323,794,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	20,782,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	82,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	13,864,501,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	46,700,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	200,000,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	100,000,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,270,845,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	732
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	121,810,319
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	6,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	14,897,310,690	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	14,391,100
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	257,111	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,152
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	914,683,165	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	237,779,068	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,601,220,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	29,120,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	137,823,348	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	678,647,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,782,245,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	419,185,000	0
3.0	511152	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	378,261,250	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	30,683,386,142	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	56,801,448
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21,462,962,958	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	746,556,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,035,819,800	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	10,625,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,675,055,902	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,133,110,891	0
3.1	521131	Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	2,734,000
3.0	521211	Belanja Bahan	7,359,279,923	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,572,760,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	152,839,400	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,947,782,987	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,983,207,780	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,184,964,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,382,998,155	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 26/04/2021 10:34 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	106,452,877	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	263,376,840	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	5,461,498,573	0
3.0	522141	Belanja Sewa	5,969,244,970	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,998,835,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	15,180,946,407	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	25,837,278
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,474,735,450	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,290,176,113	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	25,080,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,994,962,577	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137,133,700	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	44,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	17,848,198,152	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	4,164,140
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	687,080,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,898,763,821	0
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	4,062,685,931	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,750,793,881	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	300,000
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	76,250,607	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,507,750,636	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	42,394,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	119,138,459	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	66,000,000	0
JUMLAH			234,137,880,169	234,137,880,169

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 11:21 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	6,424,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	26,839,130	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	409,578,500	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	253,815,612	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,269,078
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,028,393,698	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	6,536,813	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	83,811,500,009	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	154,159,346,109	0
0.0	134113	Jaringan	144,386,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	259,960,780	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	709,434,962	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	67,400,653,761
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,711,534,298
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	40,390,625
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	137,445,000
0.0	162151	Software	786,876,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	716,650,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,789,027,900	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	1,789,027,900
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	780,706,188
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	135,504,918
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	200,077,812
0.0	212115	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	6,424,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	26,839,130
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	207,287,358,066
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,398,656,051	0
0.0	313211	Transfer Keluar	296,100,814	0
0.0	391111	Ekuitas	0	163,709,867,291
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	9,634,257,600
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,270,845,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	245,458,882
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	732
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	121,810,319
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	0
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	10,660,813

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 11:21 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	14,887,652,767	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	14,391,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	257,103	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	4,152
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	914,683,165	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	237,779,068	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,601,220,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	29,120,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	137,823,348	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	678,575,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,782,245,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	427,140,000	0
3.0	511152	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	378,261,250	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	30,800,873,495	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	56,801,448
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	21,462,962,958	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	746,556,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5,035,819,800	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	10,625,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,675,055,902	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	1,115,770,891	0
3.1	521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan	0	2,734,000
3.0	521211	Beban Bahan	7,359,279,923	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,572,760,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	152,839,400	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,669,020,987	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,360,752,567	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	103,321,530	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	263,376,840	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	6,410,320,805	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,061,947,070	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,998,835,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	23,866,381,775	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	25,837,278
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,474,735,450	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,290,176,113	0
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	25,080,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,994,962,577	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137,133,700	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	44,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	17,723,525,152	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2021 11:21 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	4,164,140
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	687,080,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,898,763,821	0
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	4,062,685,931	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,750,793,881	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	300,000
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	76,250,607	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,558,489,174	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,351,404,533	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,609,650	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	31,336,125	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,848,053,743	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,860,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	24,179,066	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	7,019,103	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	15,030,211	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1,197,295	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	22,494,441	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	53,508,536	0
JUMLAH			464,625,528,531	464,625,528,531

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 13/02/21 4:11 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN					
036010100K	BA(036) ES1(01) DKI JAKARTA					
427768	MENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0	1,398,656,051	0	1,398,656,051	0
	JUMLAH PENDAPATAN 036010100KP BA(036) ES1(01) DKI JAKARTA	0	1,398,656,051	0	1,398,656,051	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0	1,398,656,051	0	1,398,656,051	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,398,656,051	0	1,398,656,051	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 13/02/21 4:11 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,270,845,000	0	1,270,845,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	732	0	732	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	121,810,319	0	121,810,319	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG	0	1,398,656,051	0	1,398,656,051	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,398,656,051	0	1,398,656,051	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 13/02/21 3:59 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK							
2530	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	6,781,084,000	6,484,935,000	6,248,148,347	4,000	6,248,144,347	96.35	236,790,653
2531	Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi Kln	6,517,000,000	5,817,000,000	5,389,822,081	0	5,389,822,081	92.66	427,177,919
2532	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	124,480,408,000	125,232,807,000	109,391,829,677	74,470,700	109,317,358,977	87.29	15,915,448,023
2533	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko Kesra	800,000,000	723,000,000	696,838,610	0	696,838,610	96.38	26,161,390
2535	Koordinasi Kajian Bidang Kesra	1,600,000,000	1,497,000,000	1,447,767,505	0	1,447,767,505	96.71	49,232,495
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	140,178,492,000	139,754,742,000	123,174,406,220	74,474,700	123,099,931,520	88.136	16,654,810,480
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							
6220	Koordinasi Kebijakan Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	0	1,683,989,000	1,499,833,181	0	1,499,833,181	89.06	184,155,819
6221	Koordinasi Kebijakan Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	0	1,052,799,000	1,025,946,678	0	1,025,946,678	97.45	26,852,322
6222	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan	0	489,292,000	484,875,413	0	484,875,413	99.1	4,416,587
6223	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	0	191,837,000	179,682,741	0	179,682,741	93.66	12,154,259
6224	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan	0	243,560,000	239,444,557	0	239,444,557	98.31	4,115,443
6225	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	0	269,101,000	268,667,304	0	268,667,304	99.84	433,696
6226	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga	0	227,526,000	226,363,040	0	226,363,040	99.49	1,162,960
6227	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	0	291,561,000	266,468,075	0	266,468,075	91.39	25,092,925
6228	Koordinasi Kebijakan Revolusi Mental	0	14,526,115,000	14,020,903,241	25,837,278	13,995,065,963	96.34	531,049,037
6229	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah	0	1,409,005,000	1,351,420,673	0	1,351,420,673	95.91	57,584,327
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	0	20,384,785,000	19,563,604,903	25,837,278	19,537,767,625	95.972	847,017,375

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 13/02/21 3:59 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK							
2567	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,000,000,000	13,103,370,000	7,648,727,095	0	7,648,727,095	58.37	5,454,642,905
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	2,000,000,000	13,103,370,000	7,648,727,095	0	7,648,727,095	58.372	5,454,642,905
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							
2536	Koordinasi Kebijakan Urusan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	1,725,000,000	564,946,000	551,652,800	0	551,652,800	97.65	13,293,200
2537	Koordinasi Kebijakan Urusan Lingkungan	2,275,000,000	1,345,842,000	1,345,817,090	0	1,345,817,090	100	24,910
2538	Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	1,250,000,000	950,000,000	932,796,751	79,240	932,717,511	98.18	17,282,489
2539	Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	1,550,000,000	1,150,000,000	1,114,293,720	0	1,114,293,720	96.9	35,706,280
2540	Koordinasi Kebijakan Urusan Bencana	1,725,000,000	879,965,000	879,959,903	0	879,959,903	100	5,097
2541	Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial	1,650,000,000	1,423,418,000	1,387,643,282	0	1,387,643,282	97.49	35,774,718
2542	Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan	1,050,000,000	622,448,000	611,824,561	0	611,824,561	98.29	10,623,439
2543	Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan	1,125,000,000	1,197,403,000	1,103,256,984	0	1,103,256,984	92.14	94,146,016
2545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak	1,550,000,000	1,006,230,000	961,078,491	0	961,078,491	95.51	45,151,509
2546	Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan Kb	1,150,000,000	794,990,000	776,274,536	0	776,274,536	97.65	18,715,464
2547	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	1,175,000,000	570,944,000	570,908,917	2,605,000	568,303,917	99.54	2,640,083
2548	Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Penguatan Ttg	1,175,000,000	550,005,000	550,000,410	0	550,000,410	100	4,590
2549	Koordinasi Urusan Kompensasi Sosial	2,550,000,000	2,278,178,000	2,244,457,093	0	2,244,457,093	98.52	33,720,907
2550	Koordinasi Kebijakan Urusan Konflik Sosial	1,225,000,000	427,321,000	427,317,239	0	427,317,239	100	3,761
2551	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1,150,000,000	1,197,451,000	1,116,197,929	0	1,116,197,929	93.21	81,253,071
2552	Koordinasi Kebijakan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan	2,275,000,000	1,473,613,000	1,425,117,839	0	1,425,117,839	96.71	48,495,161

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 13/02/21 3:59 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2553	Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga	1,925,000,000	1,342,598,000	1,338,303,005	0	1,338,303,005	99.68	4,294,995
2554	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Dampak Pariwisata	1,050,000,000	8,142,204,000	7,896,818,047	0	7,896,818,047	193.92	245,385,953
2555	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pelayanan Kesehatan	1,675,000,000	1,361,950,000	1,329,475,265	0	1,329,475,265	97.62	32,474,735
2556	Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia	1,175,000,000	965,770,000	937,252,600	0	937,252,600	97.05	28,517,400
2557	Koordinasi Kebijakan Pembinaan Generasi Muda	1,625,000,000	1,261,228,000	1,254,157,698	0	1,254,157,698	99.44	7,070,302
2558	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan Masyarakat	1,350,000,000	1,427,819,000	1,276,989,828	0	1,276,989,828	89.44	150,829,172
2559	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi	2,550,000,000	614,644,000	614,571,651	0	614,571,651	99.99	72,349
2560	Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	1,175,000,000	326,819,000	312,624,000	0	312,624,000	95.66	14,195,000
2561	Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan	2,225,000,000	576,964,000	576,583,143	0	576,583,143	99.93	380,857
2562	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1,125,000,000	956,092,000	932,408,952	0	932,408,952	97.52	23,683,048
2564	Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,550,000,000	1,060,490,000	804,142,355	1,475,900	802,666,455	75.69	257,823,545
2565	Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	2,275,000,000	1,773,347,000	1,746,917,432	0	1,746,917,432	98.51	26,429,568
2566	Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang Kesra	3,500,000,000	2,716,252,000	2,667,735,232	300,000	2,667,435,232	98.2	48,816,768
2568	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Sjsn)	0	19,423,063,000	18,350,310,090	10,625,000	18,339,685,090	94.42	1,083,377,910
5642	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	2,075,000,000	998,936,000	979,130,123	0	979,130,123	98.02	19,805,877
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	49,875,000,000	59,380,930,000	57,016,016,966	15,085,140	57,000,931,826	96.017	2,379,998,174
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	192,053,492,000	232,623,827,000	207,402,755,184	115,397,118	207,287,358,066	89.158	25,336,468,934
	JUMLAH	192,053,492,000	232,623,827,000	207,402,755,184	115,397,118	207,287,358,066	89.16	25,336,468,934

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/02/21 3:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK							
2530	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	6,781,084,000	6,484,935,000	6,248,148,347	4,000	6,248,144,347	96.35	236,790,653
2531	Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi Kln	6,517,000,000	5,817,000,000	5,389,822,081	0	5,389,822,081	92.66	427,177,919
2532	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	124,480,408,000	125,232,807,000	109,391,829,677	74,470,700	109,317,358,977	87.29	15,915,448,023
2533	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko Kesra	800,000,000	723,000,000	696,838,610	0	696,838,610	96.38	26,161,390
2535	Koordinasi Kajian Bidang Kesra	1,600,000,000	1,497,000,000	1,447,767,505	0	1,447,767,505	96.71	49,232,495
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	140,178,492,000	139,754,742,000	123,174,406,220	74,474,700	123,099,931,520	88.136	16,654,810,480
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							
6220	Koordinasi Kebijakan Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	0	1,683,989,000	1,499,833,181	0	1,499,833,181	89.06	184,155,819
6221	Koordinasi Kebijakan Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	0	1,052,799,000	1,025,946,678	0	1,025,946,678	97.45	26,852,322
6222	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan	0	489,292,000	484,875,413	0	484,875,413	99.1	4,416,587
6223	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	0	191,837,000	179,682,741	0	179,682,741	93.66	12,154,259
6224	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan	0	243,560,000	239,444,557	0	239,444,557	98.31	4,115,443
6225	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	0	269,101,000	268,667,304	0	268,667,304	99.84	433,696
6226	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga	0	227,526,000	226,363,040	0	226,363,040	99.49	1,162,960
6227	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	0	291,561,000	266,468,075	0	266,468,075	91.39	25,092,925
6228	Koordinasi Kebijakan Revolusi Mental	0	14,526,115,000	14,020,903,241	25,837,278	13,995,065,963	96.34	531,049,037
6229	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah	0	1,409,005,000	1,351,420,673	0	1,351,420,673	95.91	57,584,327
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	0	20,384,785,000	19,563,604,903	25,837,278	19,537,767,625	95.972	847,017,375

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 13/02/21 3:59 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK							
2567	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,000,000,000	13,103,370,000	7,648,727,095	0	7,648,727,095	58.37	5,454,642,905
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	2,000,000,000	13,103,370,000	7,648,727,095	0	7,648,727,095	58.372	5,454,642,905
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							
2536	Koordinasi Kebijakan Urusan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	1,725,000,000	564,946,000	551,652,800	0	551,652,800	97.65	13,293,200
2537	Koordinasi Kebijakan Urusan Lingkungan	2,275,000,000	1,345,842,000	1,345,817,090	0	1,345,817,090	100	24,910
2538	Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	1,250,000,000	950,000,000	932,796,751	79,240	932,717,511	98.18	17,282,489
2539	Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	1,550,000,000	1,150,000,000	1,114,293,720	0	1,114,293,720	96.9	35,706,280
2540	Koordinasi Kebijakan Urusan Bencana	1,725,000,000	879,965,000	879,959,903	0	879,959,903	100	5,097
2541	Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial	1,650,000,000	1,423,418,000	1,387,643,282	0	1,387,643,282	97.49	35,774,718
2542	Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan	1,050,000,000	622,448,000	611,824,561	0	611,824,561	98.29	10,623,439
2543	Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan	1,125,000,000	1,197,403,000	1,103,256,984	0	1,103,256,984	92.14	94,146,016
2545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak	1,550,000,000	1,006,230,000	961,078,491	0	961,078,491	95.51	45,151,509
2546	Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan Kb	1,150,000,000	794,990,000	776,274,536	0	776,274,536	97.65	18,715,464
2547	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	1,175,000,000	570,944,000	570,908,917	2,605,000	568,303,917	99.54	2,640,083
2548	Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Penguatan Ttg	1,175,000,000	550,005,000	550,000,410	0	550,000,410	100	4,590
2549	Koordinasi Urusan Kompensasi Sosial	2,550,000,000	2,278,178,000	2,244,457,093	0	2,244,457,093	98.52	33,720,907
2550	Koordinasi Kebijakan Urusan Konflik Sosial	1,225,000,000	427,321,000	427,317,239	0	427,317,239	100	3,761
2551	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1,150,000,000	1,197,451,000	1,116,197,929	0	1,116,197,929	93.21	81,253,071
2552	Koordinasi Kebijakan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan	2,275,000,000	1,473,613,000	1,425,117,839	0	1,425,117,839	96.71	48,495,161

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 13/02/21 3:59 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2553	Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga	1,925,000,000	1,342,598,000	1,338,303,005	0	1,338,303,005	99.68	4,294,995
2554	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Dampak Pariwisata	1,050,000,000	8,142,204,000	7,896,818,047	0	7,896,818,047	96.99	245,385,953
2555	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pelayanan Kesehatan	1,675,000,000	1,361,950,000	1,329,475,265	0	1,329,475,265	97.62	32,474,735
2556	Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia	1,175,000,000	965,770,000	937,252,600	0	937,252,600	97.05	28,517,400
2557	Koordinasi Kebijakan Pembinaan Generasi Muda	1,625,000,000	1,261,228,000	1,254,157,698	0	1,254,157,698	99.44	7,070,302
2558	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan Masyarakat	1,350,000,000	1,427,819,000	1,276,989,828	0	1,276,989,828	89.44	150,829,172
2559	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi	2,550,000,000	614,644,000	614,571,651	0	614,571,651	99.99	72,349
2560	Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	1,175,000,000	326,819,000	312,624,000	0	312,624,000	95.66	14,195,000
2561	Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan	2,225,000,000	576,964,000	576,583,143	0	576,583,143	99.93	380,857
2562	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1,125,000,000	956,092,000	932,408,952	0	932,408,952	97.52	23,683,048
2564	Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,550,000,000	1,060,490,000	804,142,355	1,475,900	802,666,455	75.69	257,823,545
2565	Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	2,275,000,000	1,773,347,000	1,746,917,432	0	1,746,917,432	98.51	26,429,568
2566	Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang Kesra	3,500,000,000	2,716,252,000	2,667,735,232	300,000	2,667,435,232	98.2	48,816,768
2568	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Sjsn)	0	19,423,063,000	18,350,310,090	10,625,000	18,339,685,090	94.42	1,083,377,910
5642	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	2,075,000,000	998,936,000	979,130,123	0	979,130,123	98.02	19,805,877
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	49,875,000,000	59,380,930,000	57,016,016,966	15,085,140	57,000,931,826	96.017	2,379,998,174
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	192,053,492,000	232,623,827,000	207,402,755,184	115,397,118	207,287,358,066	89.158	25,336,468,934
	JUMLAH	192,053,492,000	232,623,827,000	207,402,755,184	115,397,118	207,287,358,066	89.16	25,336,468,934

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 13/02/21 4:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	15,785,383,000	15,785,383,000	14,897,310,690	14,391,100	14,882,919,590	94.37	902,463,410
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	270,000	270,000	257,111	4,152	252,959	95.23	17,041
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	966,117,000	966,117,000	914,683,165	0	914,683,165	94.68	51,433,835
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	241,000,000	241,000,000	237,779,068	0	237,779,068	98.66	3,220,932
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,741,870,000	4,651,870,000	3,601,220,000	540,000	3,600,680,000	77.41	1,051,190,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	35,420,000	35,420,000	29,120,000	0	29,120,000	82.21	6,300,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	189,192,000	189,192,000	137,823,348	0	137,823,348	72.85	51,368,652
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	703,923,000	703,923,000	678,647,820	0	678,647,820	96.41	25,275,180
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,950,000,000	2,954,097,000	2,782,245,000	0	2,782,245,000	94.18	171,852,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	400,000,000	420,825,000	419,185,000	0	419,185,000	99.61	1,640,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	25,013,175,000	25,948,097,000	23,698,271,202	14,935,252	23,683,335,950	91.33	2,264,761,050
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	183,750,000	405,500,000	378,261,250	0	378,261,250	93.28	27,238,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	183,750,000	405,500,000	378,261,250	0	378,261,250	93.28	27,238,750
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	41,603,075,000	40,446,403,000	30,683,386,142	56,801,448	30,626,584,694	75.86	9,819,818,306
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	41,603,075,000	40,446,403,000	30,683,386,142	56,801,448	30,626,584,694	75.86	9,819,818,306
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	66,800,000,000	66,800,000,000	54,759,918,594	71,736,700	54,688,181,894	81.98	12,111,818,106
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24,652,635,000	21,809,156,000	21,462,962,958	0	21,462,962,958	98.41	346,193,042
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	1,144,000	0	0	0	0	1,144,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	322,560,000	762,987,000	746,556,500	0	746,556,500	97.85	16,430,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,226,720,000	5,321,426,000	5,035,819,800	10,625,000	5,025,194,800	94.63	296,231,200
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,468,360,000	2,684,860,000	2,675,055,902	0	2,675,055,902	99.63	9,804,098
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,499,175,000	1,133,110,891	2,734,000	1,130,376,891	75.58	368,798,109
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	28,670,275,000	32,078,748,000	31,053,506,051	13,359,000	31,040,147,051	96.8	1,038,600,949
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	9,417,550,000	8,026,957,000	7,359,279,923	0	7,359,279,923	91.68	667,677,077
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,544,020,000	3,776,350,000	3,572,760,000	0	3,572,760,000	94.61	203,590,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	384,910,000	385,910,000	152,839,400	0	152,839,400	39.6	233,070,600
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,137,560,000	1,947,782,987	0	1,947,782,987	91.12	189,777,013

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 13/02/21 4:10 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,346,480,000	14,326,777,000	13,032,662,310	0	13,032,662,310	90.97	1,294,114,690
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,103,101,000	6,071,489,000	5,983,207,780	0	5,983,207,780	98.55	88,281,220
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,226,000,000	1,184,964,300	0	1,184,964,300	96.65	41,035,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,103,101,000	7,297,489,000	7,168,172,080	0	7,168,172,080	98.23	129,316,920
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,640,000,000	2,427,990,000	2,382,998,155	0	2,382,998,155	98.15	44,991,845
522112	Belanja Langganan Telepon	198,000,000	111,000,000	106,452,877	0	106,452,877	95.9	4,547,123
522113	Belanja Langganan Air	204,000,000	282,000,000	263,376,840	0	263,376,840	93.4	18,623,160
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,125,093,000	5,796,517,000	5,461,498,573	0	5,461,498,573	94.22	335,018,427
522141	Belanja Sewa	4,961,804,000	6,141,763,000	5,969,244,970	0	5,969,244,970	97.19	172,518,030
522151	Belanja Jasa Profesi	8,626,600,000	6,790,000,000	5,998,835,000	0	5,998,835,000	88.35	791,165,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,582,432,000	15,941,909,000	15,180,946,407	25,837,278	15,155,109,129	95.23	786,799,871
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,884,398,000	2,474,735,450	0	2,474,735,450	85.8	409,662,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,337,929,000	40,375,577,000	37,838,088,272	25,837,278	37,812,250,994	93.72	2,563,326,006
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,634,961,000	3,291,867,000	3,290,176,113	0	3,290,176,113	99.95	1,690,887
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	28,000,000	25,080,000	0	25,080,000	89.57	2,920,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,033,628,000	3,089,584,000	2,994,962,577	0	2,994,962,577	96.94	94,621,423
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	137,134,000	137,133,700	0	137,133,700	100	300
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	98,473,000	98,473,000	44,000,000	0	44,000,000	44.68	54,473,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,767,062,000	6,645,058,000	6,491,352,390	0	6,491,352,390	97.69	153,705,610
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	17,223,822,000	18,504,908,000	17,848,198,152	4,164,140	17,844,034,012	96.45	660,873,988
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,231,110,000	819,330,000	687,080,000	0	687,080,000	83.86	132,250,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,337,856,000	12,958,398,000	11,898,763,821	0	11,898,763,821	91.82	1,059,634,179
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,179,765,000	4,062,685,931	0	4,062,685,931	97.2	117,079,069
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,593,181,000	14,323,794,000	13,750,793,881	300,000	13,750,493,881	96	573,300,119
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	46,385,969,000	50,786,195,000	48,247,521,785	4,464,140	48,243,057,645	95	2,543,137,355
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2,404,676,000	20,782,000	0	0	0	0	20,782,000
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,238,000,000	82,000,000	76,250,607	0	76,250,607	92.99	5,749,393
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,642,676,000	102,782,000	76,250,607	0	76,250,607	74.19	26,531,393
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	123,253,492,000	151,612,626,000	143,907,553,495	43,660,418	143,863,893,077	94.92	7,748,732,923

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 13/02/21 4:10 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000,000	13,864,501,000	8,507,750,636	0	8,507,750,636	61.36	5,356,750,364
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-	0	46,700,000	42,394,000	0	42,394,000	90.78	4,306,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,000,000,000	13,911,201,000	8,550,144,636	0	8,550,144,636	61.46	5,361,056,364
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	200,000,000	119,138,459	0	119,138,459	59.57	80,861,541
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	200,000,000	119,138,459	0	119,138,459	59.57	80,861,541
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	100,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66	34,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	100,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66	34,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,000,000,000	14,211,201,000	8,735,283,095	0	8,735,283,095	61.47	5,475,917,905
	JUMLAH BELANJA	192,053,492,000	232,623,827,000	207,402,755,184	115,397,118	207,287,358,066	89.16	25,336,468,934

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 13/02/21 4:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,499,175,000	1,133,110,891	2,734,000	1,130,376,891	75.58	368,798,109
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	1,499,175,000	1,133,110,891	2,734,000	1,130,376,891	75.58	368,798,109
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,137,560,000	1,947,782,987	0	1,947,782,987	91.12	189,777,013
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	2,137,560,000	1,947,782,987	0	1,947,782,987	91.12	189,777,013
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,226,000,000	1,184,964,300	0	1,184,964,300	96.65	41,035,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	1,226,000,000	1,184,964,300	0	1,184,964,300	96.65	41,035,700
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,884,398,000	2,474,735,450	0	2,474,735,450	85.8	409,662,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	2,884,398,000	2,474,735,450	0	2,474,735,450	85.8	409,662,550
5231	Belanja Pemeliharaan							
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	28,000,000	25,080,000	0	25,080,000	89.57	2,920,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	28,000,000	25,080,000	0	25,080,000	89.57	2,920,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,179,765,000	4,062,685,931	0	4,062,685,931	97.2	117,079,069
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	4,179,765,000	4,062,685,931	0	4,062,685,931	97.2	117,079,069
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	11,954,898,000	10,828,359,559	2,734,000	10,825,625,559	90.58	1,129,272,441
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-	0	46,700,000	42,394,000	0	42,394,000	90.78	4,306,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	46,700,000	42,394,000	0	42,394,000	90.78	4,306,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	46,700,000	42,394,000	0	42,394,000	90.78	4,306,000
	JUMLAH BELANJA	0	12,001,598,000	10,870,753,559	2,734,000	10,868,019,559	90.58	1,133,578,441

Laporan Barang Pengguna

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)
 TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Tanggal : 25/04/21 11:23 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_k

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,435,248,881
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	66,779,064
117199	Persediaan Lainnya	17,044,592
132111	Peralatan dan Mesin	76,925,679,564
133111	Gedung dan Bangunan	154,040,207,650
134113	Jaringan	144,386,000
135111	Aset Tetap Renovasi	259,960,780
135121	Aset Tetap Lainnya	709,207,812
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(62,189,092,633)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,360,129,765)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(36,780,975)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(137,445,000)
162151	Software	786,876,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	650,650,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	250,365,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(250,365,400)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(749,370,063)
J U M L A H		163,563,222,407

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020
 TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Tanggal : 26/04/21 10:35 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	3,028,393,698
117199	Persediaan Lainnya	6,536,813
132111	Peralatan dan Mesin	83,811,500,009
133111	Gedung dan Bangunan	154,159,346,109
134113	Jaringan	144,386,000
135111	Aset Tetap Renovasi	259,960,780
135121	Aset Tetap Lainnya	709,434,962
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(67,400,653,761)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11,711,534,298)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(40,390,625)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(137,445,000)
162151	Software	786,876,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	716,650,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,789,027,900
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,789,027,900)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(780,706,188)
J U M L A H		163,552,354,999

Lampiran Penyusutan Aset Tetap

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Koreksi	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2019	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020
A	Tanah							
1	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Bantu	7	1.419.467.538	1.327.865.003	37.813.287	(45.310.002)	1.320.368.288	99.099.250
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	21.174.664.750	12.607.695.186	1.685.653.044	(1.210.422.500)	13.082.925.730	8.091.739.020
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	65.315.000	56.375.000,00	2.235.000		58.610.000	6.705.000
4	Alat Bengkel Bermesin	10	7.920.000	4.158.000	792.000		4.950.000	2.970.000
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	8.160.000	5.041.000	1.632.000		6.673.000	1.487.000
6	Alat Ukur	5	2.883.635	1.441.818	576.727		2.018.545	865.090
7	Alat Pengolahan	4	775.031.174	774.719.279	311.895		775.031.174	-
8	Alat Kantor	5	8.423.093.423	7.045.489.218	478.682.607	(11.097.680)	7.513.074.145	910.019.278
9	Alat Rumah Tangga	5	18.147.850.283	15.224.255.046	1.032.471.415	(80.097.864)	16.176.628.597	1.971.221.686
10	Alat Studio	5	3.342.376.461	2.399.988.725	340.456.004		2.740.444.729	601.931.732
11	Alat Komunikasi	5	377.138.740	260.004.008	65.072.348		325.076.356	52.062.384
12	Peralatan Pemancar	10	5.103.905.102	3.149.557.613	498.522.612		3.648.080.225	1.455.824.877
13	Alat Kedokteran	5	403.236.119	202.923.630	32.101.249		235.024.879	168.211.240
14	Unit Alat Laboratorium	8	673.691.530	668.817.030	1.596.063		670.413.093	3.278.437
15	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	312.233.288	232.752.985	20.630.387		253.383.372	58.849.916
16	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		11.924.000	5.426.643,00	1.703.429		7.130.072	4.793.928
17	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	206.298.432	130.655.673	13.753.229		144.408.902	61.889.530
18	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	24.764.300	23.526.085	1.238.215		24.764.300	-
19	Alat Khusus Kepolisian	4	62.420.810	56.884.945	3.765.577		60.650.522	1.770.288
20	Komputer Unit	4	15.137.324.697	11.589.220.405	1.433.613.038		13.022.833.443	2.114.491.254
21	Peralatan Komputer	4	7.929.712.577	6.386.815.032	839.368.629		7.226.183.661	703.528.916
22	Alat Kerja Penerbangan	10	3.267.000	2.343.450	226.700		2.570.150	696.850
23	Peralatan Olah Raga		198.821.150	33.136.859,00	66.273.719		99.410.578	99.410.572
	Jumlah		83.811.500.009	62.189.092.633	6.558.489.174	(1.346.928.046)	67.400.653.761	16.410.846.248

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Koreksi	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2019	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	154.159.346.109	8.360.129.765	3.351.404.533		11.711.534.298	142.447.811.811
	Jumlah		154.159.346.109	8.360.129.765	3.351.404.533	-	11.711.534.298	142.447.811.811
D	Jaringan Irigasi dan Jalan							
1	Jaringan Listrik	40	144.386.000	36.780.975	3.609.650	-	40.390.625	103.995.375
	Jumlah		144.386.000	36.780.975	3.609.650	-	40.390.625	103.995.375
E	Aset Tetap Lainnya							
1	Aset Tetap Renovasi	0	259.960.780	-	-	-	-	259.960.780
2	Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	0	-	-	-	-	-	-
3	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	552.789.962	-	-	-	-	552.789.962
4	Barang Bercorak Kesenian	0	156.645.000	137.445.000	-	-	137.445.000	19.200.000
	Jumlah		969.395.742	137.445.000	-	-	137.445.000	831.950.742
F	Aset Lainnya							
1	Aset Tak Berwujud *	0	1.503.526.500	749.370.063	31.336.125	-	780.706.188	722.820.312
2	Aset yang dihentikan penggunaannya	0	1.789.027.900	250.365.400	-	1.538.662.500	1.789.027.900	-
	Jumlah		3.292.554.400	999.735.463	31.336.125	1.538.662.500	2.569.734.088	722.820.312
	Total		242.377.182.260	71.723.183.836	9.944.839.482	191.734.454	81.859.757.772	160.517.424.488

* Amortisasi

Lampiran Laporan Rekening Pemerintah

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR REKENING

No.	Kantor /Satuan Kerja	Kementerian Negara/ Lbg	BA - Es 1	Jenis Rekening (Giro /deposito)	Nomor Rekening	Nama rekening	Rek. Atas Nama	Bank /Kantor Pos	Jumlah Uang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	032901002105303	Bendahara Pengeluaran Menko Bidang Kesra	Bendahara Pengeluaran Menko Bidang Kesra	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
2	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000015301	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi I	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi I	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
3	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000016307	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi II	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi II	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
4	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000017303	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi III	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi III	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
5	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000018309	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi IV	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi IV	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
6	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000019305	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi V	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi V	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
7	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000020306	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi VI	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi VI	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
8	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000021302	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi VII	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi VII	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
9	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000024300	Bendahara Pengeluaran Pembantu KPAN	Bendahara Pengeluaran Pembantu KPAN	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
10	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000025306	Bendahara Pengeluaran Pembantu Zoonosis	Bendahara Pengeluaran Pembantu Zoonosis	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
11	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000026302	Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0
12	427768	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	036 - 01	Giro	124601000027308	Bendahara Pengeluaran Pembantu Perencanaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Perencanaan	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR REKENING

No.	Kantor /Satuan Kerja	Kementerian Negara/ Lbg	BA - Es 1	Jenis Rekening (Giro /deposito)	Nomor Rekening	Nama rekening	Rek. Atas Nama	Bank /Kantor Pos	Jumlah Uang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	427785	Kementerian Koordinator Bidang PMK	036 - 01	Giro	124601000014305	BPG 018 SEKRETARIAT DJSN	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DJSN	BRI Kantor Kas Menko Kesra	Rp0
14	419372	Kementerian Koordinator Bidang PMK	036 - 01	Giro	124601000035301	BPG 018 REVOLUSI MENTAL	Bendahara Pengeluaran Revolusi Mental	BRI Cabang Jakarta Veteran	Rp0

Jakarta, 31 Desember 2020
Kepala Bagian Keuangan

Hasannandi
NIP. 19690819 199003 1 003

**Lampiran Laporan Kas di Bendahara
Pengeluaran serta Kas Lainnya dan Setara
Kas Per 31 Desember 2020**

**LAPORAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN KEMENKO PMK PER 31 DESEMBER TA 2020
BERUPA SALDO KAS DI BENDAHARA PEGELUARAN DAN SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
SESUAI DENGAN LAMPIRAN II SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-670/PB/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016**

Kas Di Bendahara Pengeluaran

No	Kode Satker	Nama Satker	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Daftar Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran	Satker BLU		Keterangan
					Kas di BLU	Deposito	
1	419372	REVOLUSI MENTAL	Rp -	-	-	-	-
2	427768	MENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	Rp 6.424.000	-	-	-	-
3	427785	SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	Rp -	26.839.130	-	-	-
Jumlah			Rp 6.424.000	Rp 26.839.130	-	-	-

Catatan Kemenko Bidang PMK tidak memiliki Bendahara Penerimaan.